

# **HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL**

Oleh : Erman Rajagukguk

## **KULIAH 1 : PENDAHULUAN**

### **A. MENGAPA MODAL ASING DATANG KE SUATU NEGARA?**

Berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor : upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, design industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi; insentif untuk investor; dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.

#### **1. Upah Buruh Murah**

Untuk menekan biaya produksi, perusahaan negara-negara maju melakukan investasi di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan upah buruh

yang murah.<sup>1</sup> Kebanyakan negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah, dengan tingkat upah yang jauh lebih murah dibandingkan upah buruh untuk pekerjaan yang sama dinegara-negara maju. Dengan menanamkan modal di negara berkembang yang memiliki tenaga kerja yang melimpah, para investor dapat mengembangkan modalnya atau usahanya dengan ongkos atau biaya yang murah.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya mencari upah buruh yang murah, paling tidak ada lima pertimbangan lain yang digunakan para investor sebelum menanamkan modalnya, yaitu<sup>3</sup>:

1. Cultural factors (worker motivation, capital movements, preparation, etc).
2. Labour regulations.
3. Responsiveness of the surrounding economy in providing supporting good and services;
4. Credibility of public, sector commitments about taxes, infrastructure and other regulatory issues.

---

<sup>1</sup> John Robinson, *Aspects of Development dan Underdevelopment*, (London : Cambride University Press, 1979).

<sup>2</sup> Brinley Thomas, *The Historical Record of International Capital Movements*, dalam John H. Dunning (Ed), *International Investment*, Penguin Books, hal.47.

<sup>3</sup> Theodaore H. Moran, *Foreign Direct Investment and Development*, (Washington : Institute for International Economics, 1998) hal. 85.

## 5. Institutional base of commercial law.

Di Indonesia, tingkat upah buruh industri khususnya industri sepatu, upahnya mungkin paling murah jika dibandingkan di negara-negara lain. Mungkin hanya Vietnam yang upahnya lebih murah, yakni per minggu 9,36 per dollar AS. Dari data tahun 2001<sup>4</sup>, menurut Djimanto Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Seluruh Indonesia upah buruh di Vietnam yang bekerja selama 48 jam per minggu sebesar US\$ 50,60 dan Indonesia mencapai US\$ 71,18 selama 40 jam per minggu. Jika upah minimum jadi dinaikkan 38 % dari 526.000 per bulan maka menjadi Rp. 591.000, upah buruh di Indonesia menembus US\$ 95,54.

Perbandingan upah buruh di Indonesia sebetulnya sangat pincang. Antara upah minimum dan upah yang tertinggi di suatu perusahaan bisa 1:50. Perbandingan ini terasa semakin tidak adil, jika dibandingkan dengan upah-upah buruh di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika Serikat, Hongkong dan Jepang.

Menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga konsultan industri tekstil yang berkedudukan di Amerika Serikat - Werner International, upah buruh

---

<sup>4</sup> Tersingkir Negeri Pesaing, Gatra, 20 Juli 2002.

per jam di sektor tekstil pada tahun 2000 mencapai sekitar 13 dollar AS atau Rp. 130.000,- per jam. Di Belgia tingkat upahnya lebih tinggi, yaitu sekitar 28 dollar AS per jam, di Jerman sekitar 24,5 dollar AS, sedangkan di Belanda sekitar 25,7 dollar AS per jam.

Sementara di negara-negara Asia<sup>5</sup>, tingkat upah buruh tekstil tertinggi adalah Jepang. Di negara matahari terbit tersebut, buruh tekstil di bayar 31 dollar AS per jam. Singapura 4,7 dollar AS per jam, Malaysia 2,5 dollar AS per jam, Hongkong mencapai 4,8 dollar AS per jam, Korea Selatan sebesar 4,5 dollar AS per jam. Sedangkan di Cina, sekitar 1,1 dollar AS per jam, Filipina 1,1, dollar AS per jam, Pakistan 0,5 dollar AS per jam dan Thailand 1,7 dollar AS per jam. Untuk Indonesia, pada tahun 1995 ketika nilai satu dollar AS masih berada di kisaran Rp. 2.000,- upah buruh sekitar 0,5 dollar AS per jam. Namun, sejak krisis ekonomi terjadi dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp. 8.500 AS per dollar, tingkat upah buruhnya menjadi 0,285 dollar AS per jam.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 4.

## **2. Dekat Dengan Sumber Bahan Mentah**

Bahan mentah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Kebanyakan negara-negara maju memiliki bahan mentah yang sangat terbatas, sedangkan negara-negara berkembang memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi. Untuk itulah, negara-negara maju melakukan penanaman modal memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari dekatnya bahan mentah, dalam arti tidak perlu mengimpor bahan mentah yang memakan waktu dan biaya.

Akibat dari eksploitasi bahan mentah oleh negara-negara maju dapat menimbulkan pembangunan yang tergantung.<sup>6</sup> Ketergantungan yang klasik didasarkan pada eksploitasi bahan mentah, tetapi dengan berkembangnya teknologi, produksi bisa dilakukan di mana saja. Proses semacam ini, menurut Evans,<sup>7</sup> pada mulanya modal asing masuk ke negara-negara pinggiran hanya bertujuan menguras bahan mentah dan menjual barang industri. Kemudian perkembangan teknologi memungkinkan proses

---

<sup>6</sup> Fernando Henrique Cardoso; "Assosiated Depedent Development : Theoritical and Practical mplications", dalam Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000) hal.75.

produksi dipisah-pisahkan. Produksi barang modal dipusatkan di negara-negara pusat sedangkan produksi barang konsumsi dapat dilakukan di mana saja. Dengan demikian muncullah aliansi "tripel", yakni kerjasama antara (1) modal asing, (2) pemerintah di negara pinggiran yang bersangkutan dan (3) kapitalis lokal. Modal asing melalui perusahaan-perusahaan multinasional raksasa, melakukan investasi di negara pinggiran. Kerjasama antara pemerintah lokal dan modal asing bersifat kerjasama ekonomi.<sup>8</sup>

Bagi Indonesia sumber bahan mentah merupakan suatu keunggulan yang menjadi daya tarik bagi para investor asing, negeri yang sangat luas dan melimpahnya sumber daya alam.

Potensi sumber daya alam lain, yang dimiliki Indonesia adalah keragaman dan kekayaan ekosistem.<sup>9</sup> Sebagian besar kekayaan itu berada di hutan konservasi dan hutan lindung seluas 54 juta hektar atau 30 persen dari total daratan Indonesia. Pada saat ini tercatat Indonesia memiliki sekitar 27.500 spesies tumbuhan

---

<sup>7</sup> Peter Evans, *Dependent Development, Protection : Pricention University Press, Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000).

<sup>8</sup> Alvin Y. So, *Social Development : Modernization, Dependency, and World System Thories*, (California : SAGE Publications, 1990).

berbunga (10 persen dari seluruh tumbuhan dunia), 1.539 spesies burung (17 persen dari seluruh burung di dunia), 515 spesies satwa mamalia (12 persen dari seluruh spesies reptilia di dunia), dan 270 spesies amfibia (16 persen dari seluruh amfibia di dunia). Secara keseluruhan, Indonesia memiliki hutan seluas 120,343 juta hektar yang terbagi atas hutan konservasi seluas 20,5 juta hektar, hutan lindung seluas 33,519 juta hektar dan hutan produksi seluas 33,519 juta hektar dan hutan produksinya seluas 66,324 juta hektar. Provinsi Papua mempunyai potensi sumber daya alam khususnya bidang kehutanan. Untuk itulah pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam berjanji mengajak dan mendorong para pengusahanya untuk berinvestasi di Papua.<sup>10</sup>

Daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan sasaran investasi adalah Kawasan Timur Indonesia dan Pulau Batam. Kawasan Timur Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa baik sumber daya alam maupun mineral.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hutan Lindung Tergusur Pertambangan, Kompas, Sabtu, 12 Juni 2002.

<sup>10</sup> Kompas, Malaysia dan Brunei Dorong Investor ke Papua, 20 Juli 2002.

<sup>11</sup> Percepatan pembangunan KTI melalui tax holiday, Bisnis Indonesia, 11 Juni 2002.

Setiap daerah di KTI mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Untuk menganalisa perekonomian di suatu pulau ada 9 (sembilan) faktor usaha yang perlu diperhatikan; (1) bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan (9) produk jasa.

### **3. Menemukan Pasar Yang Baru**

Negara-negara maju berusaha menanamkan modal di negara lain dengan tujuan untuk menjaga pasar hasil produksinya.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa investor datang ke suatu negara.<sup>12</sup>

1. Mengamankan komoditi ekspor dan mengambil keuntungan dari rendahnya upah buruh dalam menghasilkan produk-produk teknologi yang rendah.

---

<sup>12</sup> Michael Fairbanks dan Stace Lindsay, *Memilih Kemakmuran : agenda untuk Membangkitkan Pasar*, (Jakarta : Jurnal Reformasi Ekonomi, 2000) hal. 47.

2. Memperoleh akses terhadap pasar konsumen yang lebih besar, dan
3. Mengambil keuntungan dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang unik yang tidak mudah ditiru oleh negara lain.

Negara-negara berkembang merupakan pasar yang sangat efektif untuk memasarkan hasil produksi dari negara-negara maju. Dengan adanya pasar baru akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penanam modal asing.

Jumlah penduduk yang sangat besar yang umumnya damai dan adaptif secara dinamis pada kemajuan merupakan salah satu potensi yang menjadi daya tarik bagi investor. Managing Director Bayer (*South East Asia*) Peter Glaessel<sup>13</sup>, menilai Indonesia merupakan negara utama tujuan investasi dan pengembangan bisnis di kawasan Asia Tenggara. Alasannya luas wilayah dan jumlah penduduk diatas 210 juta merupakan insentif yang menarik bagi investor.

Meskipun perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang menggembirakan, Indonesia tetap menjadi pilihan investor karena adanya pasar yang prospektif.

Salah satu buktinya, adalah meningkatnya penjualan sepeda motor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya permintaan sepeda motor, yaitu; *pertama*, perbaikan pendapatan riil masyarakat; *kedua*, pengucuran kembali kredit perbankan; *ketiga*, perubahan pola permintaan para pembeli ke sepeda motor dan lebih kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pendorong perubahan pola permintaan ini adalah tingginya persaingan dari pola produk negara Cina yang memproduksi sepeda motor dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Perusahaan-perusahaan asing dan multinasional pada umumnya memproduksi barang-barang substitusi impor. Pasarannya memang lapisan pembeli tertentu yang berpendapat lebih tinggi, tetapi juga tidak melupakan sasaran konsumen berpendapatan rendah, misalnya di bidang sandang dan pangan termasuk pakaian.

#### **4. Royalti dari Alih Teknologi**

Penanaman modal asing, seringkali akan diikuti dengan alih teknologi. Negara investor akan mendapatkan keuntungan dari proses transfer teknologi

---

<sup>13</sup> Media Indonesia, Investor Butuh Jaminan Keamanan, Mei 2001.

melalui penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, desain industri. Transfer teknologi meliputi<sup>14</sup> : (1) *product*; (2) *production process*, (3) *machinery*. *In the present context, technology is categorized to include hardware technology machinery and complete plants, and so forth and software technology, training, management and marketing.*

Sebagai negara yang memiliki keunggulan di bidang teknologi, negara maju akan mendapatkan kompensasi dari pengguna teknologi tersebut.

Teknologi pada awalnya dikuasai negara-negara maju dan pada perkembangan berikutnya dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Pada proses pemanfaatan inilah terjadi *transfer of teknologi*. Negara-negara maju melakukan transformasi teknologi dalam rangka melakukan sosialisasi budaya teknologi dan sekaligus untuk meningkatkan keuntungan finansial. Sedangkan negara berkembang berkenan menerima transformasi teknologi dalam rangka mempercepat pembangunan.

---

<sup>14</sup> Edward K.Y Chen and Teres Y.C Wong. *Two way FDI between Hongkong and Mailand China dalam Foreign Dirrect Investment in Asia*, 1995, hal. 254.

Untuk melakukan alih teknologi, negara maju tidak secara otomatis akan mentransfer semua teknologinya, ada beberapa bagian yang *direserve* atau diperlambat.

Salah satu negara yang melakukan alih teknologi di Indonesia adalah Jepang. Investor Jepang cenderung memilih melakukan alih teknologi dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dibandingkan membuka proyek baru di Indonesia. Jepang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia untuk keluar dari krisis melalui alih teknologi pada industri yang sudah ada, karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang tenaga kerja.<sup>15</sup> Investor Jepang menilai krisis yang melanda Indonesia justru memberikan peluang untuk investasi. Negara yang sedang dilanda krisis dipastikan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya dan membangun proyek baru. Investor Jepang akan memfokuskan pada kegiatan alih teknologi dan pelatihan SDM. Sesuatu yang wajar jika investor menuntut jaminan keamanan, kemudahan dan infrastruktur.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Media Indonesia, Investor Jepang masih ragu-ragu, 20 Maret 2000

## **5. Penjualan Bahan Baku Dan Suku Cadang**

Investor asing juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan bahan baku. Hal ini terkait dengan ciri negara berkembang yaitu belum dapat memproduksi bahan baku yang memadai yang dapat dijadikan barang jadi.<sup>17</sup>

Selain itu penanaman modal asing juga memperoleh keuntungan dari penjualan suku cadang (*spare parts*).

Investasi yang paling banyak yang berhubungan dengan suku cadang adalah di bidang industri otomotif. Sebagai contohnya Honda Motor Co Ltd (HMC), salah satu raksasa industri sepeda motor bebek. Rencananya pada bulan Maret 2003 HMC akan menambah investasinya di Indonesia sebesar 123 juta dollar AS. Dengan semakin banyaknya industri Jepang di luar negeri yang menghasilkan baik onderdil maupun produk akhirnya, maka banyak onderdil untuk kendaraan maupun alat besar lainnya untuk digunakan dalam perakitan produk mereka di negara tempat investasi perakitan dilakukan.

Negara-negara yang bersaing untuk menjual komponen produksi di Indonesia antara lain Jepang, negara-negara Eropa, Korea Selatan dan Cina. Volume

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> F.H. Cardoso, "Associated-Dependent Development : Theoretical and Practical Implications," dalam Suwarsono dan Alvin Y. So,

impor kendaraan bermotor roda dua pada saat krisis ekonomi meningkat cukup tajam. Hal ini menyebabkan industri kendaraan bermotor dalam negeri mati satu per satu kecuali yang merakit kendaraan bermotor roda-dua.

## **6. Insentif lain**

Faktor lain yang menarik investor adalah adanya insentif-insentif lain, misalnya *tax holiday*.

Menteri Koordinator bidang perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan<sup>18</sup>, pemerintah masih memberikan fasilitas *tax holiday* (pembebasan pajak) untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia tetapi tidak untuk di kawasan Barat Indonesia.

Bambang Soedibyo berpendapat lain<sup>19</sup>, pemberian insentif berupa *tax holiday* untuk menarik investor asing tidak diperlukan karena yang dibutuhkan adalah kemampuan pemerintah menciptakan keamanan yang kondusif, penegakan hukum yang konsisten dan

---

<sup>17</sup> *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta : LP3ES, 1994), hal. 133.

<sup>18</sup> Menteri Koordinator Perekonomian Dorodajatun Kuntjoro Jakti, Pemerintah Berikan Fasilitas Tax Holiday, *Suara Pembaharuan*, 18 Mei 2002.

<sup>19</sup> Bambang Soedibyo, Percepatan KTI melalui *tax holiday*, *Bisnis Indonesia*, 11 Juni 2002.

merumuskan suku bunga perbankan. Pada saat ini investor menghadapi *expected risk*.

Kebijakan *tax holidays* telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kelompok yang mendukung penerapan *tax holidays* menyatakan *pertama*, investasi asing akan menjadi rendah jika tidak diberi perlakuan khusus; *kedua*, pada saat ini Indonesia memiliki resiko berusaha yang tinggi - termasuk tingginya resiko politik. *Tax holidays* diharapkan akan menjadi insentif bagi para investor.

Sedangkan kelompok yang tidak setuju pada penerapan *tax holidays* mempunyai alasan tersendiri.

*Pertama*, *tax holidays* terbukti bukan merupakan suatu kebijakan yang efektif dalam menarik investasi asing ke Indonesia. Pengalaman Indonesia menerapkan *tax holidays* menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kurang menunjukkan dampak yang berarti bagi pertumbuhan investasi. Untuk menarik investor lebih baik melakukan kebijakan lain dari pada menerapkan *tax holidays*, seperti; (1) memfasilitasi kedekatan antara pusat produksi dengan pasarnya; (2) menyediakan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; (3) menyediakan

sarana dan prasarana yang cukup memadai; (4) menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan.

*Kedua*, menguji efektivitas *tax holidays* dalam menarik investasi asing tidak cukup untuk menyusun suatu kebijakan. Penerapan kebijakan tersebut dapat menurunkan penerimaan negara yang pada gilirannya berakibat pada pengurangan pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah harus meningkatkan penerimaannya, dengan adanya *tax holidays*, beban yang ditanggung oleh wajib pajak akan lebih besar dari seharusnya. Pajak yang dibebankan kepada masyarakat akan lebih tinggi untuk menutup kekurangan penerimaan negara dari *tax holidays* yang diberikan investor.

*Ketiga*, pemberian *tax holidays* mempunyai nuansa diskriminasi terhadap investor. Apabila *tax holidays* tersebut diberikan kepada seluruh investor baik dalam maupun luar negeri, maka anggaran negara akan terbebani. Akan tetapi, jika hanya diberikan kepada investor asing atau beberapa investor saja, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesamaan perlakuan terhadap semua investor dan dapat mendorong praktek korupsi dalam pemberian *tax holidays*.

Insentif lain yang bisa diberikan dapat berbentuk; *pertama*, insentif fiskal dan kelonggaran moneter. Sri Mulyani Indrawati, tidak setuju dengan adanya insentif fiskal, karena hanya akan menghasilkan respons pelaku ekonomi yang cenderung *konsumtif* dan *oportunistik*; *kedua*, investor tidak dibebani kewajiban untuk berdivestasi.<sup>20</sup> Namun pembebasan kewajiban untuk melakukan divestasi untuk sektor pertambangan tidak dapat dijadikan jaminan investor asing akan masuk ke Indonesia. Program divestasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada negara dan merupakan cerminan kedaulatan bangsa dan salah satu upaya melibatkan pihak lokal untuk mengawasi mitra asing<sup>21</sup>; *ketiga*, tingkat suku bunga yang lebih rendah atau subsidi bunga bank dan kemudahan fasilitas kredit; *keempat*, kemudahan dan kepastian usaha yang diwujudkan lewat pemberian *tax holidays* atau tarif pajak lain.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sri Mulyani Indrawati, Dua Belas Proyek Besar dan Investasi, Gatra, 6 Juli 2002.

<sup>21</sup> Sekjen Pertambangan Indonesia (Perhapi) Juangga Mangasi, Investor asing tidak wajib divestasi, Bisnis Indonesia, 31 Mei 2002.

<sup>22</sup> Media Indonesia, KTI Perlu Insentif selain Tax Holiday, 7 Mei 2002.

Dalam pada itu, ada yang berpendapat, pemerintah harus mulai memikirkan pemberian insentif pajak (*tax allowance*) bagi perusahaan-perusahaan asing yang telah lama beroperasi. Upaya ini diperlukan untuk mencegah hengkangnya investor asing ke negara lain yang sedang gencar-gencarnya memberikan kemudahan.

#### **7. Status Khusus Negara - Negara Tertentu dalam Perdagangan Internasional**

Tujuan lain dari penanaman modal di luar negeri adalah karena status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional. Misalnya, investor asing lebih tertarik membuka usaha dinegara-negara berkembang yang masih mendapatkan status GSP (General System of Preferences) dari negara maju. Dengan demikian eksport dari negara-negara yang mempunyai status GSP tersebut lebih menguntungkan dari pada eksport dari negara yang tidak memiliki lagi status GSP.

=====

## **B. MENGAPA INDONESIA MEMERLUKAN MODAL ASING?**

Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.

Menurut Raden Pardede,<sup>23</sup> pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi sekitar 6-7 persen, dengan kisaran angka itu diperkirakan lapangan kerja dan tabungan masyarakat meningkat.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% tahun 2005 dan 5,5% pada 2006, memerlukan investasi Rp. 379,8 triliun dan Rp. 471,4 triliun. Dari investasi yang diperlukan tahun 2005 sebesar Rp. 379,8 triliun, hanya Rp. 82,3 triliun yang diperkirakan berasal dari Pemerintah. Sebagian besar, yakni Rp. 297,5 triliun berasal dari

---

<sup>23</sup> Kompas, Agustus 2002

masyarakat. Sementara itu untuk 2006, dari investasi Rp. 471,4 triliun, dari masyarakat Rp. 378,6 triliun dan sisanya Rp. 92,9 triliun berasal dari Pemerintah.<sup>24</sup>

### **1. Penyediaan Lapangan Kerja**

Sejak terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, pengangguran mengalami peningkatan yang sangat besar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia, yaitu *pertama*, terjadinya krisis ekonomi sehingga menyebabkan menurunnya kegiatan usaha dan investasi asing. *Kedua*, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena utang dalam negeri atau luar negeri membesar akibat melemahnya rupiah. Salah satu dampak lain krisis moneter adalah ketidakmampuan perusahaan membeli bahan baku luar negeri, menurunnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar sebagian pengusaha mengurangi produksi dan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. *Ketiga*, laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tiap tahun sebesar 1,7 juta orang.

---

<sup>24</sup> Kompas, Agustus 2002, Kompas 17 Maret 2004

Menurut *Center for Labor and Development Studies* (CLDS),<sup>25</sup> jumlah pengangguran saat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan karena jumlahnya mencapai 42 juta jiwa pada tahun 2002 dan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sekitar 3% maka angka pengangguran pada tahun 2003 akan mencapai 43,6 juta dan pada tahun 2004 mencapai 45,2 juta. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,2%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 sebesar 3,5 persen tidak bisa menyediakan kebutuhan lapangan kerja. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kala mengatakan,<sup>26</sup> bahwa pertumbuhan ekonomi 3%-4% per tahun tidak akan cukup menyerap pengangguran dan tidak cukup untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, karena dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut, praktis tidak ada aktivitas ekonomi yang mampu menampung luapan tenaga kerja.

Pada tahun 2003, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4%, laju inflasi 9%, nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp.9000/US\$, penerimaan

---

<sup>25</sup> *Republika*, 13 Mei 2002

<sup>26</sup> *Bisnis Indonesia*, Selasa, 30 Juli 2002

minyak dan gas sebesar Rp.70,97 triliun. Banyak kalangan sebelumnya menilai asumsi itu terlalu optimis, sekalipun tidak memadai untuk menyerap sekitar 8 juta penganggur terbuka saat ini.<sup>27</sup>

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 4%, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan dari penerimaan pajak, hasil ekspor migas dan nonmigas, tabungan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Jika hanya mengandalkan sumber dalam negeri, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan berkelanjutan. Untuk itulah diperlukan adanya investasi asing.

Pertumbuhan angka investasi jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya mempengaruhi jumlah pengangguran serta perputaran roda ekonomi. Jika tidak ada perkembangan ekonomi yang optimal akan memicu terjadinya ledakan pengangguran yang akan menciptakan permasalahan sosial dan memperburuk stabilitas keamanan maupun politik. Gejolak sosial politik pada gilirannya mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

---

<sup>27</sup> Bisnis Indonesia, Selasa, 17 September 2002

## **2. Mengembangkan Industri Substitusi Import Untuk Menghemat Devisa**

Pada permulaan kembalinya modal asing ke Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pemerintah mengembangkan industri substitusi import, untuk menghemat devisa.

Perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dengan demikian memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimport.

Dengan berkurangnya import, Indonesia akan barang-barang jadi, akan menghemat devisa.

## **3. Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor nonmigas untuk mendapatkan devisa**

Dalam lima tahun terakhir mulai tahun 1997 sampai 2001, kegiatan ekspor nonmigas dan migas mengalami fluktuasi. Pada tahun 1998 nilai ekspor nonmigas menurun 3,65 persen dan pada tahun 1999 menurun 4,57 persen. Ekspor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 22,92 persen terjadi pada tahun 2000, namun pada tahun 2001 kembali menurun sebesar 8,99 persen.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terpuruknya nilai ekspor Indonesia, antara lain *pertama*, rendahnya harga komoditas migas; *kedua*, rendahnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat suku bunga. Perubahan nilai tukar telah mengakibatkan meningkatnya biaya produksi (biaya penggunaan bahan baku, bahan penolong impor dan biaya produksi). *Ketiga*, rendahnya produksi sektor riil; *keempat*, melemahnya daya saing komoditas tradisional seperti pakaian jadi, sepatu, kayu lapis dan karet yang telah diolah; *kelima*, pasar domestik tidak tumbuh sementara pasar internasional ambruk akibat jatuhnya ekonomi global. Pasar-pasar tradisional ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang saat memang sempat terpuruk dalam krisis ekonomi.

Merosotnya nilai ekspor Indonesia mengancam sektor riil. Daya saing industri yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja besar menjadi sangat menurun. Ini terjadi antara lain pada industri, kayu, pulp dan kertas, elektronik, tekstil, alas kaki, dan produk kulit yang merupakan 70 persen dari total

ekspor nonmigas dan menyerap 70 persen dari total tenaga kerja.<sup>28</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,<sup>29</sup> perkembangan ekspor Indonesia adalah sebagai berikut ; (1) tahun 1998 ekspor migas sebesar 7,9 miliar US\$ dan nonmigas sebesar 40,9 miliar US\$; (2) tahun 1999 ekspor migas sebesar 9,8 miliar US\$ dan nonmigas 38,7 miliar US\$; (3) tahun 2000 ekspor migas sebesar 14,4 miliar US\$ dan nonmigas sebesar 46,9 miliar US\$; (4) tahun 2001 ekspor migas sebesar 5,6 US\$ dan ekspor nonmigas sebesar 21,6 miliar US\$.

Amerika Serikat merupakan negara yang memberikan nilai ekspor terbesar dengan jumlah rata-rata 6,9 juta dollar AS, disusul Jepang (6,6 juta dollar AS), Singapura (5,3 juta dollar AS), Hongkong (1,6 juta dollar AS) dan Belanda (1,6 juta dollar AS).

Sejak krisis ekonomi ekspor nasional nonmigas, terus mengalami penurunan. Padahal dari ekspor inilah, Indonesia bisa memperoleh devisa dengan cepat sehingga dapat digunakan untuk melakukan *recovery* ekonomi. Penurunan ini juga dirasakan oleh industri tekstil dan

---

<sup>28</sup> Tempo, 6 Januari 2002

<sup>29</sup> Republika, Senin 19 Agustus 2002

produksi tekstil.<sup>30</sup> Pada tahun 1998, ekspor TPT minus 0,07 persen. Tahun 1999 menurun lebih besar mencapai 2,08 persen dengan nilai nominal mencapai US\$ 7,29 miliar. Tahun 2000 naik 15,09 persen dengan nilai nominal US\$ 6,304 miliar. Laju pertumbuhan ekspor Indonesia pada tahun 2001 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di Asia dan Amerika terjadi penurunan sampai 12 persen, Eropa turun 9 persen (8,4 dollar AS), dan Afrika turun 3 persen (1 milyar dollar AS), sedangkan dari Australia dan Oceania hanya 993 juta dollar AS atau turun 4 persen.

Sektor lain yang juga menurun adalah industri sepatu. Sekjen Asosiasi Persepatuan Indonesia Djimanto,<sup>31</sup> menyatakan kinerja ekspor industri sepatu domestik selama semester pertama tahun 2002 turun 10 persen, sementara prinsipial produk sepatu merek Reebok dan Nike yang telah menghentikan pesanan dari pemasoknya. Berdasarkan data yang dihimpun dari anggota Asprindo, total ekspor sepatu Indonesia periode Januari-Juni hanya mencapai US\$ 700 juta, sedangkan periode yang sama pada tahun 2001 nilai ekspor mencapai US\$800 juta.

---

<sup>30</sup> Jawa Pos, 6 Januari 2002

Akibat menurunnya nilai ekspor Indonesia, pada pertengahan 1997 cadangan devisa berkurang sampai 560 juta dollar dan akhir tahun 1997 cadangan devisa berkurang 4,1 milyar dollar AS. Tahun 1999 cadangan devisa Indonesia bertambah 3,2 milyar dollar AS dan tahun 2000 bertambah 5,6 milyar dollar AS. Sedangkan untuk tahun 2001 cadangan devisa berkurang sekitar 1,3 milyar dollar AS. Pengurangan ini sebagai akibat nilai saldo transaksi berjalan turun menjadi 6 milyar dollar AS.

Untuk menutup defisit transaksi berjalan, pemerintah harus memacu nilai ekspor baik migas maupun nonmigas. Upaya peningkatan ekspor menghadapi beberapa masalah seperti, masalah likuiditas mata uang asing, penegakan hukum yang lemah, kurangnya jaminan keamanan, serta terlalu seringnya frekuensinya perubahan kebijakan.<sup>32</sup>

Untuk itulah, Indonesia harus memperbaiki berbagai hambatan-hambatan dalam ekspor dan mencari pasar alternatif untuk memasarkan produk ekspor. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk mendorong kinerja ekspor dapat dilakukan dengan memberikan paket

---

<sup>31</sup> Bisnis Indonesia, 31 Juli 2002

stimulus pada sektor elektronik dan sektor yang lain. Selain itu, pemerintah harus mampu menciptakan usaha yang sehat dan menciptakan mekanisme yang efektif serta iklim yang kompetitif.<sup>33</sup>

Untuk meningkatkan nilai ekspor baik migas dan nonmigas diperlukan adanya investasi asing. Dengan peningkatan nilai ekspor diharapkan akan meningkatkan devisa atau valuta asing yang dicadangkan dan dikuasai oleh Bank. Dana inilah yang akan digunakan untuk membiayai impor dan kewajiban lain kepada pihak asing.

Selain mendorong datangnya investasi asing, untuk meningkatkan ekspor memerlukan adanya perbaikan iklim usaha. Hasil survei indeks kepercayaan eksportir yang dilakukan oleh perusahaan konsultan Castle Asia menyatakan, bahwa indeks kepercayaan eksportir untuk jangka pendek pada kuartal ketiga tahun 2002 mengalami penurunan, yakni dari 32,5 persen menjadi 27,0 persen.<sup>34</sup> Untuk itulah, Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) meminta Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 54 tanggal 23 Juli 2002, agar

---

<sup>32</sup> Bisnis Indonesia, Kamis, 12 Desember 2002

<sup>33</sup> Bisnis Indonesia, Sabtu, 11 Januari 2003

<sup>34</sup> Kompas, 26 Agustus 2002

segera mengkoordinasikan upaya-upaya pemberantasan berbagai penyelundupan secara intensif.<sup>35</sup>

#### **4. Pembangunan Daerah-Daerah Tertinggal**

Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti pelabuhan, telekomunikasi, perhubungan udara, air minum, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini diperlukan dalam rangka membangun daerah-daerah yang tertinggal atau rusak akibat terjadinya berbagai konflik seperti di provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Papua, Maluku dan Poso.

Di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, menurut Gubernur Abdullah Puteh, sejak berlangsungnya konflik Aceh sejak 4 tahun silam, tingkat keterpurukan ekonomi rakyat dan infrastruktur sangat memprihatinkan sehingga diperlukan adanya perbaikan dan pembangunan infrastruktur.<sup>36</sup>

Pada tahun 2003, pemerintah menyediakan dana berkisar Rp. 10 triliun - Rp. 12 triliun, yang bersumber dari APBN dan investor, untuk pengembangan

---

<sup>35</sup> Republika, 20 Agustus 2002

infrastruktur.<sup>37</sup> Proyek-proyek infrastruktur tersebut sifatnya lebih kepada *cost recovery*, sehingga pemerintah akan menggunakan dana APBN 2003 untuk proyek yang dapat mendukung program pengentasan kemiskinan. Sedangkan dana pinjaman luar negeri untuk proyek pengentasan kemiskinan di Indonesia mencapai US\$ 250 juta. Dana tersebut akan digunakan dalam dua tahap yakni tahap satu di enam provinsi dan tahap kedua di tiga provinsi. Menurut Menkimpraswil Soenarno, ke depan Depkimpraswil harus mulai mengusahakan investasi di bidang infrastruktur supaya perekonomian bisa bergerak lebih cepat dan bisa mengurangi pengangguran.

Berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah dan pengusaha Afrika Selatan pada saat ini sedang menjajaki investasi pengolahan GTL (*gas to liquid*) guna menekan biaya transportasi pengiriman. Pertimbangan pemerintah Afsel diantaranya, Indonesia memiliki potensi sumber daya gas yang tergolong sangat banyak, sedangkan pengiriman dalam bentuk LNG (gas alam) biayanya cukup mahal.

---

<sup>36</sup> Lihat Bisnis Indonesia, Selasa, 14 Januari 2003, hal. 7

<sup>37</sup> Bisnis Indonesia, Senin, 26 Agustus 2002

Kawasan yang menjadi prioritas untuk dijadikan tempat investasi adalah di Kawasan Timur Indonesia. Menurut Manuel Kaisipo, ada tiga investor asing yang telah menanamkan investasi pertambangan di Kawasan Timur Indonesia sebesar US\$ 2,1 miliar. Investasi tersebut dilakukan di tiga daerah KTI yaitu Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Irian Jaya.<sup>38</sup>

Di Sulawesi Utara, investasi yang dilakukan adalah di bidang pertambangan emas, sedangkan di Maluku Utara dan Irian Jaya investasi di bidang pertambangan nikel. Investasi ini telah menyerap 10 ribu sampai 30 ribu tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari masyarakat setempat.

Untuk mengembangkan potensi daerah Papua dan masyarakat setempat, Pemerintah Malaysia dan Brunei berjanji akan mengajak dan mendorong para pengusaha di negaranya untuk menanam modal didaerah tersebut.<sup>39</sup> Kehadiran investor selain mengembangkan bisnis juga untuk membangun daerah setempat. Untuk mendukung proyek tersebut, Pemerintah Daerah Papua harus mempersiapkan infrastruktur dan menciptakan kondisi keamanan. Infrastruktur yang terpenting adalah

---

<sup>38</sup> Tempo Interaktif, 4 September 2001

pembangunan jalan-jalan, jembatan, dermaga dan pelabuhan udara di setiap kabupaten dan kecamatan.

Daerah lain yang menantikan investor baru diantaranya Kabupaten Karangasem di Bali.<sup>40</sup> Investor diharapkan dapat meningkatkan promosi investasi pariwisata dengan menetapkan tiga kawasan tujuan wisata utama. Jika dibandingkan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang ketinggalan selangkah dalam mengembangkan potensinya hingga kontribusi sektor swasta juga masih sangat minim. Selama ini jumlah usaha formal hanya tercatat 17.000-an unit yang hampir seluruhnya berupa industri kecil dan hanya sebagian kecil usaha yang tergolong usaha menengah dan besar yang berkonsentrasi disektor akomodasi pariwisata.

Pada sektor pariwisata, Karangasem mempunyai potensi alam dan pantai yang masih asri sehingga mempunyai prospek yang cukup menjanjikan bagi para investor yang akan menanamkan investasinya. Untuk menarik investor, pemerintah daerah secara serius melakukan pembenahan hukum. Salah satunya, Bappeda Karangasem menetapkan rencana umum tata ruang

---

<sup>39</sup> Kompas, 26 Juli 2002

berdasarkan potensi dan peruntukan lahan. Untuk sementara pengembangan wisata di Taman Ujung menggunakan bantuan Bank Dunia dan APBN. Menurut Kepala Bapeda Komang Gede, rehabilitasi objek wisata seluas 2.500 hektar akan dilaksanakan dua tahap, yaitu tahap pertama membutuhkan dana sebesar 1,3 milliar dari Bank Dunia dan Rp. 195,6 juta dari APBD. Pada tahap kedua, total dana yang dibutuhkan Rp. 7,6 milliar yang terdiri dari Rp. 6,6 milliar dari Bank Dunia dan Rp. 99 juta dari dana pemerintah kabupaten. Khusus di daerah Tulamben, investor diharapkan dapat berinvestasi pada sarana atraksi pariwisata dan akomodasi. Secara keseluruhan Karangasem memiliki 18 objek wisata yang tersebar di Dadung, Gianyar dan Tabanan. Di luar tiga kawasan tersebut, ada juga peluang untuk pengembangan akomodasi pendukung *tourisme* seperti pendirian pondok wisata, *home stay* dan sejumlah fasilitas lainnya termasuk *arts shop*.<sup>41</sup>

Untuk wilayah Jawa, kawasan yang saat ini memerlukan investasi diantaranya Ujung Kulon untuk membangun prasarana dan sarana guna menunjang pengembangan objek wisata berbasis lingkungan dan

---

<sup>40</sup> Bisnis Indonesia, Jum'at 16 Agustus 2002

masyarakat (*ecotourism*).<sup>42</sup> Investasi dari swasta terutama dibutuhkan dalam bentuk pembangunan tempat akomodasi, transportasi dan berbagai fasilitas lainnya.

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah setempat bersama investor Cina akan segera merealisasikan pembangunan rel kereta api dari Makassar ke Pare-Pare yang dilanjutkan hingga Luwu dengan dana Rp.35 triliun. Pembangunan rel tersebut tahap pertama dibangun dari Makassar ke Pare-Pare sepanjang 155 km, kemudian dilanjutkan tahap kedua dari Pare-pare hingga kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dengan panjang sekitar 300 km. Investor lain yang akan segera merealisasikan investasinya adalah PT Ramai Abadi (PMA Malaysia) yang akan melakukan investasi di Tarakan, Kaltim dengan nilai US\$ 3 juta. Investasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan pasar swalayan. Jumlah tenaga kerja yang akan terserap pada super market baru tersebut direncanakan sebanyak 14 orang tenaga kerja asing (TKA) dan 104 TKI (Tenaga Kerja Indonesia).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> *Bisnis Indonesia*, 16 Agustus 2002

<sup>43</sup> Ibid

Direktur Utama PT (Persero) PLN Eddie Widiono menyatakan, jika tidak ada investasi baru dalam sektor ketenagalistrikan dan hanya mengandalkan komitmen yang sudah ada, PLN tidak bisa lagi memberikan sambungan listrik kepada pelanggan baru pada tahun 2005. Sebab kemampuan suplai PLN tidak bertambah, sedangkan kebutuhan terus meningkat jauh melampaui kemampuan PLN.<sup>44</sup> Tanpa pembangunan sarana kelistrikan sampai tahun 2005, Indonesia akan masuk ke dalam skenario terbatas, yaitu penolakan PLN terhadap pelanggan baru terhadap PLN. Hal ini menunjukkan, tingkat rasio jumlah pelanggan yang kini hanya 42 persen tidak dapat ditingkatkan. Bila mengikuti skenario tersebut, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 3,5 hingga 4 persen serta pertumbuhan ekonomi hingga 8, maka PLN akan membutuhkan investasi ketenagalistrikan di Indonesia sebesar Rp. 99 triliun sampai tahun 2005 atau sekitar Rp. 20 triliun per tahun. PT PLN memprediksikan kebutuhan dana untuk mengatasi krisis listrik nasional tahun 2003 mencapai US\$ 44,5 juta.<sup>45</sup> Dana tersebut diperhitungkan dari kebutuhan proyek pembangkit sebesar US\$ 212,5 juta dan untuk proyek

---

<sup>44</sup> Kompas, Senin, 6 Mei 2002

jaringan sebesar US\$ 332 juta. Hal ini terkait dengan terjadinya krisis listrik di wilayah Jawa-Bali yang semula diperkirakan akan terjadi pada tahun 2004 ternyata maju dan akan terjadi pada tahun 2003.

Gejala ini terlihat dari beban puncak saat ini yang mencapai 12.900 MW, padahal pada tahun 2002 ini PLN memperkirakan beban puncak Jawa-Bali sekitar 13.950 MW. Untuk mengatasi krisis listrik tersebut, PLN membutuhkan dana minimal Rp. 99 triliun selama lima tahun berturut-turut sesuai dengan skenario rendah.

Investasi ini diperlukan untuk bisa menyediakan fasilitas kelistrikan di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa yang saat ini telah mengalami krisis listrik. Untuk mengatasi krisis listrik, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Tim Keppres 133 yang bertugas mengendalikan seluruh perjalanan ketenagalistrikan dan membantu pemulihan ekonomi. Tim ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah negosiasi dari proyek-proyek listrik swasta yang telah dibuat kontraknya pada masa lalu tetapi tertunda hingga saat ini. Upaya lain, mengajak para investor untuk

---

<sup>45</sup> Bisnis Indonesia, Selasa, 18 Juni 2002

berinvestasi di pulau Jawa yang mengalami perkembangan kebutuhan listrik sangat pesat dengan perhatian menyelesaikan proyek Tanjung Jati B di Jepara yang akan selesai pada tahun 2005 dan fokusnya menyelesaikan transmisi Paiton-Kediri-Klaten (PKK).

Menurut ekonom Faisal Basri dan pengamat ketenagalistrikan Ariono Abdulkadir<sup>46</sup>, untuk menarik investor pada sektor kelistrikan, pemerintah sebaiknya memberikan insentif kepada investor dengan pembangunan infrastruktur listrik tak dapat ditunda-tunda lagi dan harus ada investasi untuk mencegah krisis listrik yang lebih parah. Krisis listrik saat ini sudah terjadi di 28 daerah di luar pulau Jawa-Bali, sementara untuk wilayah Jawa-Bali diperkirakan baru akan terjadi pada tahun 2006 jika tidak ada investasi.

## **5. Alih Teknologi**

Penanaman modal asing diharapkan dapat mewujudkan alih teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Kelemahan negara berkembang dalam bidang teknologi akan sangat mempengaruhi proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi.

---

<sup>46</sup> Kompas, Selasa, 7 Mei 2002

Untuk itulah diperlukan adanya dana yang cukup untuk dialokasikan dalam pengembangan teknologi. Bagi Indonesia, investasi asing mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses industrialisasi dan alih teknologi.

Pada sisi lain, untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia harus mendatangkan investor asing yang bergerak dalam bidang teknologi informasi.<sup>47</sup> Investasi tersebut digunakan untuk mengurangi kesenjangan digital sesuai target pemerintah bahwa seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki akses internet tahun 2005.

Untuk menarik investor asing, kemudahan-kemudahan investasi saja tidak cukup tetapi diperlukan juga adanya perlindungan Hak Milik Intelektual. Hal ini untuk mengatasi berbagai pelanggaran atau pembajakan pada piranti lunak (*software*). Pada saat ini di Indonesia, pembajakan *software* mencapai 88 persen, dan mendudukkan Indonesia sebagai salah satu negara tertinggi tingkat pembajakannya di dunia setelah Vietnam dan Cina.<sup>48</sup> Menurut Direktur Bisnis *Software*

---

<sup>47</sup> *Bisnis Indonesia*, 8 Mei 2002

<sup>48</sup> *Republika*, 13 Juli 2002

*Alliance* (BSA) untuk Asia Pasifik Jess Hardee, pada tahun 1996 tingkat pembajakan mencapai 96 persen, tahun 2001 mencapai 88 persen.

=====

### C. SYARAT-SYARAT UNTUK MENARIK MODAL ASING

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara yang bersangkutan. Bagi negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu; kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.<sup>49</sup>

Oleh karenanya bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu; *pertama*, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); *kedua*, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); *ketiga*, *legal certainty* atau kepastian hukum.

---

<sup>49</sup> Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Assess, quantify and monitor* (London : Euromony Publications, 1979) hal. 54.

Uraian berikut ini akan membahas syarat-syarat untuk menarik investasi asing.

### **1. Syarat adanya kesempatan ekonomi (Economic opportunity)**

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersedianya pasar yang prospektif.

Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, seperti; *pertama*, negeri yang sangat luas dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. *Kedua*, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.

Dengan melihat beberapa potensi, Indonesia masih menjadi tempat tujuan penanaman modal yang menarik

bagi investor asing meskipun penegakan keamanan dan kepastian hukum masih dipertanyakan banyak pihak.<sup>50</sup>

Selain potensi-potensi ini, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia bakal mengalami *booming* seperti negara Asia lainnya. Syaratnya, pemerintah harus serius dalam melanjutkan reformasi dan bisa meyakinkan pasar.<sup>51</sup> Deputi Direktur IMF Anoop Singh menyatakan, dengan dilaksanakannya kebijaksanaan secara konsisten, kepercayaan pasar akan pulih dan Indonesia pasti akan memenuhi sasaran pertumbuhan. Langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melaksanakan reformasi struktural yang meliputi reformasi perbankan, restrukturisasi perusahaan, serta reformasi hukum.<sup>52</sup>

Namun, potensi-potensi tersebut pada saat ini belum mampu diberdayakan secara maksimal dan Indonesia justru terpuruk dalam krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan kajian Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia bukan sekedar 10-20%

---

<sup>50</sup> Media Indonesia, *Indonesia Masih Menarik Investor Asing*, 7 Oktober 2000.

<sup>51</sup> Media Indonesia, *"Ekonomi Indonesia Bisa Booming - Jika Pemerintah Serius Lakukan Reformasi"*, 2000

<sup>52</sup> *ibid*

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi 60% penduduk sudah hidup dengan pendapatan di bawah US\$ 2 per hari, sehingga sangat rentan terhadap kemiskinan pendapatan dan sosial.

Berkaitan dengan keunggulan komparatif Indonesia di bidang tenaga kerja di akui para investor Jepang. Investor Jepang cenderung melakukan alih teknologi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan membuka proyek baru di Indonesia. Jepang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia untuk keluar dari krisis melalui alih teknologi pada industri yang sudah ada, karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang tenaga kerja.<sup>53</sup> Investor Jepang, menilai krisis ekonomi yang menimpa Indonesia justru memberikan peluang untuk investasi. Negara yang sedang dilanda krisis, dipastikan akan memberi kemudahan-kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya dan membangun proyek baru. Investor Jepang akan memfokuskan pada kegiatan alih teknologi dan pelatihan SDM. Sesuatu yang wajar jika investor menuntut jaminan keamanan, kemudahan, dan infrastruktur.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Media Indonesia, "Investor Jepang masih Ragu-Ragu", 20 Maret 2000.

<sup>54</sup> *ibid*

Berdasarkan laporan tahunan peringkat daya saing internasional (*world competitiveness yearbook*) yang disusun oleh International Institute for Management Development (IIMD) yang berbasis di Lausanne, Swiss, Indonesia naik satu tingkat ke urutan 45 dari 47 negara yang disurvei. Tahun lalu Indonesia berada pada peringkat ke 46. Pemeringkatan kali ini dilakukan berdasarkan 290 kriteria, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga tingkat penggunaan komputer dan regulasi perburuhan. Sekitar dua pertiga kriteria penilai didasarkan pada data statistik empiris dan sepertiga sisanya dari survei terhadap 3.263 eksekutif bisnis di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut tidak ada penjelasan secara eksplisit, apakah perbaikan peringkat Indonesia ini karena memang ada perbaikan di pihak Indonesia.

Dengan adanya perbaikan peringkat tersebut, membuktikan bahwa peluang investasi di Indonesia masih menguntungkan (*profitable*).<sup>55</sup>

Adanya rekomendasi IMF kepada CGI untuk meneruskan dukungan kepada pemerintah Indonesia merupakan salah satu faktor lain yang turut mendukung

---

<sup>55</sup> Kompas, Timteng dan ASEAN dukung investasi di RI, 31 Juli 2000. Hal. 14.

datangnya para investor.<sup>56</sup> Dukungan tersebut mempunyai persyaratan agar pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan program ekonomi dan reformasi struktural. Laporan IMF kepada anggota CGI menetapkan lima kebijakan utama yang dibutuhkan untuk mengembalikan perekonomian ke jalurnya yaitu; *pertama*, membuat kemajuan signifikan dalam keberlanjutan fiskal dengan mengurangi beban utang pemerintah; *kedua*, membuat kemajuan dalam privatisasi dan restrukturisasi aset BPPN; *ketiga*, menerapkan kebijakan moneter untuk membawa kembali laju inflasi satu digit tahun depan; *keempat*, memperkuat upaya untuk mengurangi kerentanan sistem perbankan dan memulihkan berfungsinya mekanisme kredit; *kelima*, mempercepat upaya perbaikan iklim investasi melalui reformasi hukum dan pemerintahan.

Faktor lain yang menjadi syarat investasi asing adalah tersedianya lahan untuk mendirikan industri pendukung. Pada saat ini, para pengusaha AS, mereka lebih memilih investasi di Cina, karena disebabkan adanya perbedaan yang mencolok antara Indonesia dengan Cina menyangkut aspek industri pendukungnya. Untuk

---

<sup>56</sup> Bisnis Indonesia, Kamis, 8 November 2001, hal. 1

mengarah ke industri pendukung yang kuat dan menjadi industri pendukung investasi, sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang sulit.<sup>57</sup> Untuk membangun industri pendukung, setidaknya ada dua cara; yaitu, *pertama*; dengan menarik investor asing untuk membangun langsung industri pendukung; dan *kedua*, menumbuhkan industri lokal agar mampu mendirikan industri pendukung. Namun untuk membangun perusahaan semacam itu, dibutuhkan *tax incentive system*.

Banyak perusahaan Indonesia yang potensial untuk dikembangkan sebagai industri pendukung. Melihat peluang ini, pemerintah melalui BKPM melakukan berbagai kebijakan baru, diantaranya; *pertama*, dalam RUU Penanaman Modal dicantumkan soal pembebasan pajak sementara atau *tax holiday*; *kedua*, investor asing yang menanamkan modalnya US\$ 100 ribu, diberikan izin tinggal permanem; *ketiga*, pembentukan Dewan Penanaman Modal yang berisi Menkeu, Menaker, dan Menkeh. Dewan ini mensinergikan kebijakan investasi sehingga bisa menjadi satu acuan bagi investor asing; *keempat*, revisi PP No. 20/1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal

---

<sup>57</sup> Kompas, Berbagai Revisi Untuk Menarik Investasi Asing, Rabu, 24 April 2002

Asing dan revisi Keppres No.96/2000 tentang Daftar Negatif Investasi.

## 2. Syarat stabilitas politik (*political stability*)

Investor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor *political stability* (stabilitas politik). Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Memburuknya iklim investasi, meningkatnya *country risk* dan belum mantapnya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus modal. Kondisi semacam inilah yang terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia. Akibatnya terjadilah pelarian arus modal yang sempat memuncak dan disebutkan pernah mencapai 40 miliar dollar AS dalam beberapa bulan setelah krisis finansial tahun 1997.<sup>58</sup> Akibat lain, sampai saat ini Indonesia tidak

---

<sup>58</sup> Adig Suwandi, Pelarian Modal, Mengapa Terjadi ?, artikel Kompas, Rabu 26 Desember 2001, hal.4-5.

termasuk negara favorit untuk berinvestasi.<sup>59</sup> Dari hasil pemeringkatan yang disusun perusahaan AT Kearney tahun 2001, Indonesia tidak termasuk dalam 25 negara favorit tujuan investasi, sementara Cina menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat.

Sebenarnya resiko politik dan resiko ekonomi suatu negara tidak akan menyurutkan minat investasi, jika ada kompensasi terhadap resiko bentuk "return" yang lebih tinggi.<sup>60</sup> Dengan paket kebijakan yang bisa memberikan return yang tinggi kepada investor, diharapkan aliran modal masuk dapat segera mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Terlepas dari penilain perusahaan AT Kearney, sebenarnya banyak daya tarik yang dapat dibuat pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi.<sup>61</sup> Namun beberapa kali momentum ini lewat begitu saja akibat tingginya ketidakpastian resiko di Indonesia yang berasal dari faktor internal. Pertikaian antar elit politik menjadi salah satu pemicu instabilitas yang pada gilirannya mengganjal

---

<sup>59</sup> *ibid*

<sup>60</sup> Suara Pembaharuan, Country Risk Indonesia Masih Tinggi, Jakarta, 24 Mei 2000.

<sup>61</sup> *ibid*

upaya-upaya recovery ekonomi. Konflik politik sangat berpengaruh terhadap dunia usaha Indonesia.<sup>62</sup>

Karena alasan kekhawatiran menyangkut politik, lembaga pemeringkat internasional *Moody's Investors Service* mengatakan, tidak akan menaikkan peringkat obligasi dan surat utang, serta peringkat deposito Bank Indonesia dalam valuta asing.<sup>63</sup>

Dengan *country risk* yang sangat tinggi, maka banyak investor enggan datang ke Indonesia. Menurut Bank Pembangunan Dunia (ADB)<sup>64</sup>, menilai perekonomian Indonesia masih berisiko dan bisa terancam oleh ruwetnya kemelut ekonomi dan politik. Faktor lain yang menjadi penghambat, kegagalan mengatasi korupsi yang mewabah serta memperbaiki transparansi dan efisiensi. Untuk restrukturisasi ekonomi, ADB memperkirakan bakal terhambat oleh kondisi sosial politik yang tak mendukung.

Meskipun Indonesia mendapat penilaian yang negatif dari IMF maupun ADB, ada satu hal yang cukup menggembirakan dalam iklim investasi di Indonesia,

---

<sup>62</sup> Pande Radja Silalahi, Ekonomi Diperkirakan Semakin Memburuk, Media Indonesia, 9 Februari 2001

<sup>63</sup> Kompas, Kenaikan Peringkat RI Terganjil Problem Politik, 7 Maret 2001, hal. 13.

<sup>64</sup> Kompas, Pemulihan Ekonomi Indonesia Terancam Kemelut Politik, Kompas, 27 April 2000

yaitu negara teluk akan meningkatkan investasi di Indonesia.<sup>65</sup> Upaya terobosan untuk mengajak para investor dari negara-negara teluk dilakukan dengan mengadakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Investasi dari Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Iran serta Yaman.

Salah satu bentuk komitmen negara-negara teluk terlihat dari aspirasi yang menginginkan dibentuknya semacam lembaga *Investment Fund* (dana investasi) untuk memicu percepatan investasi di Indonesia. Pembentukan *investment fund* merupakan sebuah komitmen politik dan sekaligus merupakan kemajuan dalam dunia investasi

Untuk menarik atau meningkatkan modal asing, paling tidak diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi.

*Pertama*, mempertahankan secara terus menerus keuntungan ekonomi yang dapat diambil para investor atau dengan kata lain, penanam modal asing mempunyai kesempatan ekonomi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan investasinya.

---

<sup>65</sup> Media Indonesia, "Negara Teluk Akan Tingkatkan Investasi – Sebagai Bukti Komitmennya Kepada Indonesia", 25 April 2000.

*Kedua*, perlu menciptakan adanya kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari Undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan Pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparatur hukum yang professional dan bermoral serta didukung dengan adanya budaya hukum masyarakat.

*Ketiga*, stabilitas politik. Untuk menjamin keberlangsungan investasi asing, diperlukan adanya stabilitas politik dan harus dihindari munculnya konflik vertikal (antara elit politik) dan konflik horisontal (konflik antara kelompok masyarakat).

### **3.Syarat kepastian hukum (*legal certainty*)**

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Para investor akan datang ke suatu negara, bila dirasakan negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif.

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas

mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*).

Presiden Direktur Grant Thornton Indonesia (GTI) Jamaes Kallman menyatakan, insentif yang paling efektif untuk menarik kegiatan investasi asing adalah pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan. Ketegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan, terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan.<sup>66</sup> Banyak investor asing masih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan negara-negara tujuan investasi yang lain. Investor tidak akan melihat insentif pajak seperti *tax holiday* sebagai daya tarik investasi, melainkan apakah ada jaminan keamanan maupun penegakan hukum.

Managing Director Bayer (South East Asia) Pte Peter Glaessel,<sup>67</sup> menilai Indonesia merupakan negara utama tujuan investasi dan pengembangan bisnis di kawasan Asia Tenggara. Alasannya, luas wilayah dan

---

<sup>66</sup> Media Indonesia, Investor Butuh Jaminan Keamanan, Mei 2001

jumlah penduduk di atas 200 juta merupakan insentif yang menarik para investor. Untuk merespon peluang ini, pemerintah perlu mengurangi sektor usaha yang masuk dalam daftar negatif investasi yang selama ini tertutup bagi investor asing. Hasil survei United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menempatkan Indonesia pada urutan kedua terakhir dari 153 negara yang masuk dalam daftar indeks Foreign Direct Investment (FDI).

Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta memperbaiki sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam rangka menarik investor. Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengungkapkan masih kecilnya investasi yang masuk ke Indonesia akibat masih adanya kendala yang menyangkut sistem perpajakan, kepabeanan, prosedural birokrasi, administrasi daerah, dan soal perburuhan.<sup>68</sup>

Pembahasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi ini berkisar bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di

---

<sup>67</sup> *Ibid*

Indonesia dengan menciptakan "certainty" (kepastian), "fairness" (keadilan), dan "efficiency" (efisien).

Daniel S. Lev<sup>69</sup> menyatakan bahwa negara hukum merupakan *sine qua non*, karena tanpa proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan, sosial dan keadilan. Sejak pertengahan tahun 1998, tidak ada pembaharuan kelembagaan hukum karena elite politik tidak mampu menjalankannya. Ketidakmauannya berakar pada kepentingan, kalau proses hukum makin kuat, pimpinan politik makin terbatas kekuasaannya. Selama 40 tahun sejak 1959, pimpinan politik menikmati keleluasaan bertindak menurut kemauan sendiri tanpa dikurungi tindakannya oleh pengadilan, Kejaksaan, polisi, pers, atau organisasi dalam masyarakat. Akibatnya para jaksa, hakim, dan polisi kehilangan orientasinya pada hukum dan tidak lagi mengelak korupsi.

Untuk memulihkan perekonomian, bangsa Indonesia memerlukan investasi. Investasi bisa berjalan kalau ada strategi dalam hukum.<sup>70</sup> Strategi akan goyah jika, umpamanya, pemerintah tidak menghormati kontrak-

---

<sup>68</sup> Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Investasi Minim akibat lima hal, *Bisnis Indonesia*, 13 Juni 2002

<sup>69</sup> Daniel S. Lev, "Pemulihan Negara Hukum", *Tempo*, 6 Januari 2002.

kontrak karya yang sudah ada. Akibatnya, investor enggan datang ke Indonesia karena tidak ada kepastian hukum.

#### **a. Aspek Substansi Hukum**

Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan investor.

Ketidakpastian hukum dan politik dalam negeri mengganggu merupakan bagian dari masalah-masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif. Iklim yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KKPOD)<sup>71</sup> mengusulkan agar prosedur penanaman modal dalam pelayanan satu atap untuk menghindari dualisme. Bambang Sujagad<sup>72</sup> menyatakan investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas antara pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>70</sup> Suara Pembaharuan, *Indonesia Takkan Ubah Kontrak Karya dengan PT Freeport*, 5 Maret 2000.

<sup>71</sup> KKPOD : UU Investasi perlu layanan satu atap, *Bisnis Indonesia*, 5 Juni 2002

<sup>72</sup> *ibid*

ungkapan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno<sup>73</sup>, menurutnya dalam setahun implementasi otonomi daerah banyak terjadi konflik antar provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota karena adanya perbedaan penafsiran UU No. 22 tahun 1999. Salah satu pasal yang menimbulkan masalah diantaranya Pasal 11 ayat 2 yang memberikan kewenangan secara wajib kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dengan pemberian persetujuan permohonan PMA.

Dampak yang paling nyata dari pelaksanaan otonomi daerah adalah menyangkut masalah perizinan. Perizinan merupakan faktor yang vital yang menentukan apakah investor bersedia menanamkan modalnya atau tidak. Menurut Deputi Menteri Negara Investasi Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Andung Nitimihardja<sup>74</sup> mengatakan untuk menarik investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia relatif masih sulit, karena mereka masih mengkhawatirkan pelaksanaan UU No. 22

---

<sup>73</sup> *ibid*

Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Mereka mengkhawatirkan pelaksanaan UU itu akan mempengaruhi kelangsungan usaha mereka, apabila pada saat ini terlanjur menanamkan modalnya di daerah. Kekhawatiran yang lain, mereka melihat dengan otonomi daerah telah menyebabkan terjadinya KKN dalam bentuk lain di daerah-daerah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa pemilihan pemerintah daerah yang dilaksanakan, seringkali tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan instabilitas.

Untuk melakukan pembenahan ekonomi, pemerintah dituntut untuk menyusun dan menyempurnakan sejumlah Undang-undang yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Pada saat ini, Pemerintah bersama DPR sedang berusaha menyelesaikan pembahasan sekitar 120 Rancangan Undang-Undang,<sup>75</sup> yang akan menjadi dasar kebijakan dalam membenahi perekonomian Indonesia yang mulai menunjukkan perbaikan. Salah satunya, Undang-undang tentang Penanaman Modal dalam rangka menciptakan iklim yang betul-betul kondusif bagi dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Para pengusaha

---

<sup>74</sup> Kompas, *Persetujuan Investasi Mulai Naik*, 27 Maret 2000

<sup>75</sup> Kompas, "Pemerintah Siapkan 120 RUU untuk benahi Perekonomian", 22 Desember 2001, hal. 17.

sangat membutuhkan ketertiban sehingga mereka tidak ragu dalam melakukan kebijakan investasi.

Salah satu RUU yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah adalah RUU tentang Investasi. Dalam RUU Investasi, pemerintah akan menerapkan kebijakan *equal treatment* dengan menghilangkan status PMA dan PMDN.<sup>76</sup> Semangat yang terkandung dalam RUU Investasi adalah perlakuan yang sama (*equal treatment*), keterbukaan, dan pelayanan satu atap terhadap berbagai rintisan investasi.

#### **b. Aparatur Hukum**

Aparatur hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam menarik investor atau menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Aparatur hukum meliputi badan yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Kualitas aparat hukum yang seringkali menyebabkan kerugian negara dan menyebabkan apriori dari para investor, dapat terlihat dari budaya atau pola-pola ilegal dalam mengimpor suatu produk. Banyak barang-barang, seperti mobil mewah, senjata, tekstil, elektronik dalam jumlah besar bisa lolos ke pabeanan,

---

<sup>76</sup> Status PMA akan sama dengan PMDN, *Bisnis Indonesia*, 15 April 2002

padahal tidak dilindungi dengan dokumen yang sah.<sup>77</sup> Penyelundupan mobil mewah bahkan menggunakan modus baru dengan teknik mutilasi (pemotongan mobil menjadi beberapa bagian).

Penelitian lain yang dilakukan oleh MCKinsey and Company mengenai peringkat pelaksanaan *good corporate governance* yang melibatkan para investor di Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan *good corporate governance*.<sup>78</sup> Survei juga menunjukkan, lebih dari 75 responden menyatakan isu mengenai pemerintahan lebih penting dari pada isu mengenai keuangan. Dalam survei tersebut, juga tercermin sebenarnya para investor rata-rata setuju untuk membayar 27 persen premium jika perusahaan-perusahaan Indonesia menerapkan prinsip *good corporate governance*. Menurut pengamat pasar modal Dandosi Matram<sup>79</sup>, selama Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara sungguh-sungguh, para investor asing tidak akan datang ke Indonesia.

---

<sup>77</sup> Media Indonesia, "DPR Ancam Bekukan UU No. 10/1998", 27 Maret 2000

<sup>78</sup> Kompas, *Indonesia Terburuk dalam Good Corporate Governance*, 25 Juni 2000.

<sup>79</sup> *ibid*

Indonesia, sebetulnya tidak perlu merasa khawatir akan dijauhi investor asing.<sup>80</sup> Investasi yang sudah ada tidak akan lari jika sistem usaha yang bersih (*clean business*) diterapkan. Menurut Ketua MPR Amien Rais, kalau Indonesia jauh dari KKN, maka investor akan datang berduyun-duyun ke Indonesia.

### **c. Budaya Hukum**

Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Para investor asing akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dan adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa.

Pada saat ini, budaya hukum (*legal culture*) di Indonesia belum mampu terbangun dengan baik. Rendahnya kualitas budaya hukum tersebut sangat dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang sangat beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi

---

<sup>80</sup> Media Indonesia, "clean business akan datangkan investor asing", 3 Maret 2000

budaya hukum adalah perilaku para pengusaha atau investor.

Berdasarkan hasil survei Transparency International, lembaga anti korupsi<sup>81</sup>, menemukan fakta bahwa pengusaha mancanegara terbiasa menyuap para pejabat negara berkembang. Pada sisi lain, dalam laporan tersebut, para pengusaha asing menyatakan buruknya kondisi pengadilan di Indonesia. Sebagai contohnya, perusahaan Singapura mengeluh karena menurut mereka pengadilan terlalu dini mengambil keputusan, sebelum keterangan para tergugat didengar. Nasib yang sama, dihadapi juga perusahaan-perusahaan asuransi asal Kanada, Manulife, Philp Hampden Smith. Kasus yang sama juga menimpa, International Finance Corporation (IFC) sebuah anak perusahaan Bank Dunia. Meski perkaranya sudah sampai ke Mahkamah Agung, upaya IFC menyelesaikan sengketa lewat pengadilan kandas.

=====

---

<sup>81</sup> Forum Keadilan, Uang Semir Tuan Asing buat Pamongpraja, No.8, 9 Juni 2002